

**ETIKA KEPEMIMPINAN PENGHULU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KAMPUNG TELUK MESJID
KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK 2020-2022**

Oleh : Ruswal Yandi

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Teluk Mesjid Village is a village located in Sungai Apit District. This village is led by a headman who was elected since 2019, namely FS through simultaneous headman elections and was appointed on January, 22 2020 simultaneously by the Regent of Siak. The phenomenon that occurred in the leadership of the Penghulu Of Teluk Mesjid Village shows an example of bad leadership behavior. This research aims to determine the leadership ethics of the Penghulu Teluk Mesjid Village in administering village government. The research location is in Teluk Mesjid Village, Sungai Apit District, Siak Regency. This research uses Iwan Nugroho's theory of ethical leadership characteristics using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques through interviews and documentation. The data analysis technique used is the data collection technique from Miles and Huberman.

The results of the research show that the ethical leadership behavior carried out by the Penghulu of Teluk Mesjid FS Village during his leadership in 2020-2022 was considered not good. The headman of Teluk Mesjid Village does not reflect the characteristics of ethical leadership because he does not meet the criteria for ethical leadership characteristics. Penghulu Kampung Teluk Mesjid FS not have leadership ethical standards, namely not making policies that conflict with statutory regulations, always acting carefully and defending people who work well and correctly. The headman of Teluk Mesjid Village does not meet the indicators of an ethical leader in government because he does not have the characteristics of being accommodative, proactive and responsive.

Keywords : Ethical standars, Leadership, Village head.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan nasional memiliki tujuan yaitu guna terwujudnya ketentraman warga yang berada di NKRI. Pada pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mencakup tentang penyelenggaraan pemerintahan di desa menjadi tanggung jawab kepala desa yang mempunyai tanggung jawab memperjuangkan keperluan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Pembangunan yang ada di suatu desa diperuntukkan guna ketentraman masyarakat. Pemerintah desa serta warga dalam melaksanakan pembangunan desa dengan bersama-sama serta menggunakan kekayaan, keandalan desa, keistimewaan serta sumber daya yang terdapat pada suatu desa baik alam ataupun manusia. Implementasi program pembangunan desa tetap diawasi oleh warga sehingga informasi pembangunan desa tidak terabaikan (Wijaya & Choiriyah, 2022).

Pemerintahan Desa adalah suatu organisasi, dimana terdapat bagian-bagian yang saling berhubungan dan membutuhkan. Sehingga dalam menjalankan Pemerintahan Desa haruslah ada hubungan baik dari tiap orang-orang yang menjalankan, mulai dari kedudukan yang di atas hingga di bawah agar terjadi sistem pemerintahan yang berjalan baik pula. Dalam implementasi program desa masyarakat juga memiliki aksi penting terhadap terwujudnya tujuan dari pembangunan desa tersebut (Fathoni et al., 2018).

Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintah di desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pembina kehidupan masyarakat serta membangun mental masyarakat dalam menumbuh kembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan. Kepala Desa sebagai seorang pemimpin suatu desa merupakan faktor penentu dalam berhasil atau gagalnya suatu organisasi pemerintahan desa. Kepala desa dituntut

untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, baik kualitas maupun dari segi kuantitas. Kepemimpinan kepala desa harus mampu meningkatkan kinerja aparat desa dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi situasi khusus dibutuhkan masyarakat, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia (Kusriyah, 2019)

Kepemimpinan Kepala Desa adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang atau sekumpulan orang untuk mengajak dan menimbulkan motivasi kepada orang-orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar upaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah sebuah cara seorang pemimpin yang mempengaruhi perilaku bawahan agar mampu bekerja sama dengan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Etika menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kepemimpinan. Dalam organisasi, kepemimpinan yang dinilai baik apabila fungsi-fungsi kepemimpinan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip beretika sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Kepemimpinan beretika akan menciptakan suasana kerja dalam organisasi lebih nyaman, produktivitas lebih tinggi, dan menyelesaikan konflik yang ada di dalam organisasi. Etika kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sesuai norma dan nilai yang berlaku (Erlangga, 2018).

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan penamaan desa menjadi kampung, bahwa pada pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa

Kampung sebutan lain dari Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal 1 ayat 10 pemerintahan kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan umum masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan pasal 1 ayat 12 yang menjelaskan bahwa Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.

Kampung Teluk Mesjid adalah sebuah kampung yang terletak di Kecamatan Sungai Apit. Kampung ini dipimpin oleh seorang Penghulu yang dipilih sejak tahun 2019 yakni Bapak FS melalui pemilihan penghulu serentak dan dilantik pada 22 Januari 2020 secara serentak oleh Bupati Siak. Sebelum menjadi Penghulu Kampung Teluk Mesjid, beliau merupakan ketua Rw di Kampung Teluk Mesjid. Dalam pernyataannya FS ini memiliki banyak program kerja yang akan direalisasikan pada saat pemerintahannya berlangsung, seperti melanjutkan program yang sudah ada dan beberapa program prioritasnya seperti pembangunan Infrastruktur jalan untuk perkebunan dan program menjaga hutan dan lahan namun seiring berjalannya waktu banyak permasalahan yang timbul pada penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena yang muncul adalah sebagai berikut

Tabel 1.1 Fenomena Kepemimpinan penghulu Kampung Teluk Mesjid

No	Fenomena	Akibatnya
1	Adanya Perkataan kasar penghulu kepada staf Kampung Teluk Mesjid, seperti ucapan kurang beretika dan sebagainya yang dilontarkan kepada bawahannya.	Staf kantor Kampung pemerintahan Kampung Teluk Mesjid melakukan aksi mogok kerja
2	Aksi mogok kerja dalam melayani masyarakat. Aksi ini akibat dari ketidakharmonisan antara pegawai dengan penghulu kampung (kades). Ketidakcocokan itu muncul diduga karena sikap arogan Penghulu Kampung Teluk Mesjid, FS terhadap bawahannya. FS diduga kerap memaki bawahannya dengan kata-kata kotor (Sahril, 2021).	Masyarakat Kampung Teluk Mesjid tidak bisa mendapatkan pelayanan dari Pemerintahan Kampung Teluk Mesjid.
3	Camat Sungai Apit memberikan surat teguran SP1 kepada Penghulu Kampung Teluk Mesjid akibat dari adanya dugaan hubungan yang kurang harmonis antara penghulu dengan staf bawahan.	Penghulu Kampung Teluk Mesjid mendapat teguran dan peringatan dari Camat Sungai Apit.
4	Adanya sikap arogansi Penghulu Kepada LSM yang hendak meninjau proyek fisik semenisasi jalan tepatnya di jalan Sialang Para Dusun IV (Sutono, 2022) .	Adanya Konflik yang terjadi antara LSM dan penghulu hingga penghulu ingin mengajak adu fisik .
5	Adanya manipulasi anggaran dimana diketahui, pengerjaan proyek jalan itu menggunakan Anggaran Dana Kampung (ADK) tahun 2021 namun baru dikerjakan awal bulan Februari 2022 ini dengan nilai sebesar Rp 81.658.650 (Sutono, 2022).	Negara dirugikan akibat adanya manipulasi anggaran ini
6	Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara tanggal 21 April 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp231.711.537 (Setianto, 2022)	Negara rugi akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat kampung ini
7	Adanya tindak korupsi tersebut maka dijatuhkan hukuman Pasal 2 ayat 1 juncto	FS selaku Penghulu Kampung Teluk Mesjid resmi di tetapkan

Sumber : Olahan Penulis 2023

Fenomena yang terjadi pada kepemimpinan Penghulu Kampung Teluk Mesjid ini menunjukkan contoh perilaku kepemimpinan yang buruk. Hal ini sesuai dengan teori menurut Shinta et al., (2015) kepemimpinan yang buruk dapat dilihat dari sifat-sifat yaitu tidak mempunyai kompetensi, tidak adil, mengagungkan kekuasaan, tidak bermoral dan perilaku kriminal. Sebagai seorang pemimpin tentunya harus memiliki kepemimpinan yang baik dengan ciri yakni pemberdayaan diri, menguasai secara formal tentang ilmu manajemen organisasi, berpikir positif, visioner (berpandangan jauh ke depan), cerdas secara emosi, mengetahui dan mengamalkan cara-cara berkomunikasi yang asertif, selalu memperluas jaringan sosial, menunjukkan prestasi, penuh dengan kreativitas dan membangun suasana kebahagiaan.

Adapun permasalahan yang terjadi diatas tentunya tidak sesuai dengan etika ataupun peraturan tentang penyelenggaraan pemerintahan kampung yang sesuai dengan pasal 29 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan / atau golongan tertentu
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajiban
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan tertentu,
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
6. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
7. Menjadi pengurus partai politik
8. Merangkap jabatan sebagai ketua/ atau anggota BPD, anggota DPR RI,

anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

9. Ikut serta dan / atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan / atau pemilihan kepala daerah
10. Melanggar sumpah / janji jabatan
11. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dari beberapa data dan pernyataan tersebut, sangat perlu diteliti agar mengetahui bagaimana etika perilaku kepemimpinan Penghulu Kampung Teluk Mesjid dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung tahun 2020-2022

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk menarik rumusan masalah yaitu bagaimana etika kepemimpinan Penghulu Kampung Teluk Mesjid dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020-2022 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui etika kepemimpinan Penghulu Kampung Teluk Mesjid dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020-2022

D. KERANGKA TEORI

a. Kepemimpinan

1) Definisi Kepemimpinan

Para ahli memberikan definisi kepemimpinan, antara lain:

- a) Miftah Thoha menyatakan “kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perseorangan maupun kelompok.”
- b) Hadari melihat kepemimpinan dari dua konteks yaitu “struktural dan nonstruktural. Dalam konteks struktural kepemimpinan diartikan sebagai proses pemberian motivasi agar orang-orang yang dipimpin

melakukan kegiatan dan pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Adapun dalam konteks nonstruktural kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan mengerahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama”.

- c) Tanenbaum dan Massarik menjelaskan “kepemimpinan adalah suatu proses atau fungsi sebagai suatu peran yang memerintah”.
- d) Harold Kontz mendefinisikan kepemimpinan sebagai “pengaruh, seni atau proses mempengaruhi orang sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan kelompok dengan kemauan dan antusias”.
- e) Frigon mengungkapkan “*leadership is the art and science of getting others to perform and achieve vision*”.
- f) Nanus berpendapat “*leadership role in policy formation has a solid foundation in practice and is safely short of usurping a governing broad’s prerogative in establishing policy*”.
- g) Overton menyatakan “*leadership is ability to get work done and through others while gaining their confidence and cooperation*”.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan dorongan dan bimbingan dalam bekerjasama untuk mengejar tujuan yang telah disepakati bersama (Badu & Djafri, 2017).

b. Etika Kepemimpinan

1) Definisi Etika Kepemimpinan

Etika adalah standar normatif berupa nilai-nilai moral, norma-norma, dan hal-hal yang dianggap baik. Etika berfungsi sebagai panduan/tuntunan dalam bersikap dan berperilaku menuju kehidupan yang lebih baik. Pada dasarnya arti hakiki etika adalah determinasi pedoman untuk menjalankan apa-apa yang benar dan tidak melakukan apa-apa yang

tidak benar. Dengan demikian menjalankan suatu kehidupan yang beretika diyakini akan membawa kehidupan pada suatu kondisi yang lebih baik, yang tidak merugikan kehidupan di sekitarnya.

Etika menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kepemimpinan. Dalam organisasi, kepemimpinan yang dinilai baik apabila fungsi-fungsi kepemimpinan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip beretika sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Kepemimpinan beretika akan menciptakan suasana kerja dalam organisasi lebih nyaman, produktivitas lebih tinggi, dan menyelesaikan konflik yang ada di dalam organisasi. Dalam konteks organisasi publik atau pemerintahan, kepemimpinan yang beretika bersinggungan dengan hal makro yakni ideologi, hirarki kekuasaan, pengendalian dan budaya politik; dan perhal mikro yakni penugasan, hubungan personal, isu politik dan pengambilan keputusan. Hal tersebut mempengaruhi konstelasi seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dalam rambu-rambu moral untuk kepentingan layanan publik (Nugroho, 2013).

2) Ciri Ciri Kepemimpinan Beretika

Perkembangan etika kepemimpinan di Indonesia terus mengalami dinamika. Masyarakat juga sedang mencari model kepemimpinan yang dianggap baik, peduli, maju atau produktif. Pilihan itu dapat ditemukan di instansi pemerintah, swasta atau masyarakat. Sosok pemimpin tertentu diidolakan dan dianggap beretika, yang berbeda dengan pemimpin lain yang tidak beretika. Berikut ini merupakan ciri-ciri kepemimpinan beretika menurut (Nugroho, 2013) :

- (a) Memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai moral, mampu menjelaskannya dan menjalankan nilai-nilai moral dalam kehidupannya.
- (b) Senantiasa fokus kepada keberhasilan organisasi dibanding kepentingan individu. Pemimpin memahami

posisinya di dalam organisasi, di hadapan anggota dan stakeholder.

- (c) Menemukan orang-orang berintegritas dan mengembangkan kepercayaan kepadanya. Saat ini, yang dipentingkan adalah orang yang berintegritas dan bertanggungjawab, bukan sekedar pintar dan trampil. Mereka inilah yang dapat dipercaya mengembangkan organisasi saat ini dan ke depan.
- (d) Memelihara, menyatakan dan mengembangkan nilai-nilai positif organisasi kepada masyarakat dan stakeholder. Pemimpin perlu mengambil langkah ini untuk membangun komitmen, kepedulian dan tanggungjawab organisasi kepada masyarakat dan *stakeholder*.
- (e) Mengembangkan mekanisme berbeda pendapat. Hal ini sangat diperlukan untuk mengembangkan inovasi, pengembangan kelembagaan atau alternatif solusi organisasi. Pemimpin perlu turun kebawah menemukan permasalahan teknis dan alternatif solusi dari lapangan
- (f) Melihat nilai-nilai positif dari sisi atau pengalaman yang lain. Pemimpin perlu mengambil keputusan sulit (termasuk mengorbankan kepentingannya) demi lahirnya benefit bagi wilayah, *stakeholder* atau orang lain.

3) Upaya Mengukur Standar Etika Kepemimpinan Kepala Desa

Dilihat dari sisi etika pemerintahan, perilaku pejabat pemerintahan itu dapat di golongkan ke dalam beberapa standar, antara lain (Labolo, 2016) :

- a) Tidak membuat suatu kebijakan atau membuat keputusan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan atau melanggar aturan, dan tidak melibatkan orang-orang lain untuk kepentingan ini. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sumber utama dari etika pemerintahan, untuk itu keberadanya

perlu mendapat perhatian dan pemahaman yang seksama dan tentunya untuk di implementasikan dan tidak dilanggar.

- b) Selalu bertindak cermat, menghindari sekecil mungkin berbuat kesalahan, untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang akan dipecahkan, diselesaikan atau dicarikan jalan keluarnya dan diperlukan dukungan data dan fakta.
- c) Berusaha bekerja dengan baik dan membimbing orang lain dalam pekerjaan, untuk itu di butuhkan sensitifitas yang tinggi terhadap kebutuhan orang yang membutuhkan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- d) Membela orang-orang yang bekerja baik dan benar dan melindungi mereka yang memberikan informasi yang penting atau laporan yang penting dan berguna berkenaan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan tertentu.

4) Indikator Etika Kepemimpinan

Etika kepemimpinan pemerintahan dapat dimaknai sebagai implementasi kepemimpinan pemerintahan yang mempedomani nilai-nilai etika pemerintahan. Sebagaimana dipahami bahwa di dalam organisasi pemerintahan, peran pemimpin sangat sentral artinya dinamika Bergeraknya organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh perilaku pemimpinnya, oleh karena itu baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Adapun karakter kepemimpinan pemerintahan yang beretika antara lain (Labolo, 2016):

- 1) Akomodatif, seorang pemimpin pemerintahan harus dapat menerima kritik atau usulan dari berbagai pihak, hal ini harus dilakukan karena kebenaran itu

tidak hanya datang dari satu pihak, tetapi dari semua orang.

2) Sensitif, karakter kepemimpinan ini ditandai dengan kemampuan untuk secara dini memahami dinamika perkembangan masyarakat, mengerti apa yang mereka butuhkan, dan mengusahakan agar menjadi pihak pertama yang memberi perhatian terhadap kebutuhan itu, dengan kata lain pemimpin yang baik harus turun dari kantor atau rumah, lalu melihat kekurangan-kekurangan yang dihadapi rakyat.

3) Responsif, karakter ini ditandai aktifnya pemimpin jika berhadapan dengan rakyat, pemimpin dalam hal ini lebih banyak berperan menjawab aspirasi atau tuntutan masyarakat yang disalurkan melalui media massa. Setiap usulan rakyat tidak hanya didengar saja, tetapi ditindak lanjuti dengan aksi.

4) Proaktif, karakter ini ditandai sikap antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang akan timbul yang akan merugikan masyarakat misalnya banjir, wabah penyakit, kelaparan dan sebagainya.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya

mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah, berdasarkan *teori fenomenologis* (dan sejenisnya) untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang obyek yang diteliti secara *holistic* (Abdussamad, 2021).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini ialah jenis penelitian kualitatif deksriptif. Penelitian kualitatif deksriptif merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan ‘makna data’ atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya. Penelitian ini memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana etika kepemimpinan Penghulu Kampung Teluk Mesjid dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung tahun 2020-2022

3. Lokasi, Waktu dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, dan rincian mengapa melakukan penelitian disini adalah karena kantor Kampung Teluk Mesjid merupakan tempat bekerja Penghulu Teluk Mesjid.

Alasan memilih waktu penelitian tahun 2020 hingga 2022 adalah :

- a. Tahun tersebut terjadi banyak isu seputar kepemimpinan Penghulu Kampung Teluk Mesjid.

- b. Tahun tersebut merupakan tahun berakhirnya kepemimpinan Penghulu Kampung Teluk Mesjid sebab di landa beberapa kasus yang mengharuskannya berhenti dari jabatan

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian adalah Penghulu Kampung Teluk Mesjid.

4. Jenis Data

Penulis mendapatkan data berdasarkan jenis dan sumber sebagai berikut :

- a. **Data primer** : yaitu data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Adapun data primer pada penelitian ini adalah :
- 1) Kerani Kampung Teluk Mesjid
 - 2) Bapekam Teluk Mesjid
 - 3) Tokoh Masyarakat Kampung Teluk Mesjid
 - 4) Masyarakat Kampung Teluk Mesjid
- b. **Data sekunder** : yaitu berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah :
- 1) Data Profil Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.
 - 2) Visi dan Misi Kampung Teluk Mesjid
 - 3) Buku, Jurnal dan Perundang-undangan.

5. Sumber Data

a. Informan

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Penentuan informan

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu informan – informan yang peneliti tentukan merupakan orang – orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2016). Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kerani Kampung Teluk Mesjid	1 orang
2	Bapekam Teluk Mesjid	1 orang
3	Tokoh Masyarakat	1 orang
4	Masyarakat	2 orang
Jumlah		5 orang

Sumber : Olahan Penulis 2023

Alasan memilih informan dalam penelitian ini adalah alasan posisional dan reputasi. Artinya informan dalam penelitian yang dimaksudkan penulis memiliki posisi dan reputasi yang bisa membantu untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klasifikasi atas fenomena atau fakta tentang etika perilaku kepemimpinan Penghulu Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

- b. Dokumen seperti buku, Jurnal/Laporan Ilmiah, Regulasi/Peraturan Perundang-Undangan dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Interview merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan

tak terstruktur. *Interview* yang terstruktur merupakan bentuk interview yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. *Interview* semi terstruktur, meskipun *interview* sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. *Interview* secara tak terstruktur (terbuka) merupakan *interview* di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format format tertentu secara ketat.

Pelaksanaan wawancara bisa secara individual atau kelompok. Dalam *interview* secara individual maupun kelompok tersebut peneliti sebagai interviewer bias melakukan interview secara *directive*. Artinya, peneliti selalu berusaha mengarahkan tapi pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang mau dipecahkan. Namun demikian, bisa juga peneliti melakukan *interview* secara *nondirective*. Hal ini dilakukan apabila peneliti bukannya ingin memfokuskan pembicaraan pada suatu masalah tetapi juga ingin mengeksplorasi suatu masalah (Harahap, 2020).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan kajian-kajian terhadap dokumen yang mendukung etika kepemimpinan Penghulu Kampung Teluk Mesjid.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data dilapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis

data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data. Salah satu model analisis data menurut Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (Harahap, 2020) ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu: *Reduksi data*, *Display data*, dan *Penarikan kesimpulan*.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Etika Kepemimpinan Penghulu Kampung Teluk Mesjid dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2020-2022

- (1) Penghulu Kampung Teluk Mesjid dipilih melalui pemilihan kampung serentak yang diadakan oleh Bupati Siak pada 2019 dan kemudian dilantik pada 22 Januari 2020, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 214/HK/KPTS/2020, tanggal 22 Januari 2020 Tentang pengangkatan penghulu Kampung Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak dan tugas pokok, fungsi penghulu pada Kampung Teluk Mesjid berdasarkan peraturan Bupati Siak Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung adalah bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat dan berfungsi sebagai : Menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan dikampung, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
- (2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perkampungan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan

- (3) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna
- (4) Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan
- (5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Penghulu Kampung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab terkait pengelolaan keuangan desa, hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan
- b. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:
 - a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan keuangan barang milik desa
 - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
 - d) Menetapkan PPKD
 - e) Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL
 - f) Menyetujui RAK Desa dan
 - g) Menyetujui SPP

Menurut Iwan Nugroho (Nugroho, 2018) Etika menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kepemimpinan. Dalam organisasi, kepemimpinan yang dinilai baik apabila fungsi-fungsi kepemimpinan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip beretika sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Kepemimpinan beretika akan menciptakan suasana kerja dalam organisasi lebih nyaman, produktivitas lebih tinggi, dan menyelesaikan konflik yang ada di dalam organisasi. Untuk melihat kepemimpinan memiliki kriteria sebagai pemimpin berteika apabila terdapat ciri ciri kepemimpinan yang bertetika sebagai berikut :

a. Ciri Ciri Kepemimpinan Beretika

- (a) Kepemimpinan bertetika harus memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai moral, mampu menjelaskannya dan menjalankan nilai-nilai moral dalam kehidupannya.
- (b) Senantiasa fokus kepada keberhasilan organisasi dibanding kepentingan individu.
- (c) Menemukan orang-orang berintegritas dan mengembangkan kepercayaan kepadanya.
- (d) Memelihara, menyatakan dan mengembangkan nilai-nilai positif organisasi kepada masyarakat dan stakeholder
- (e) Mengembangkan mekanisme berbeda pendapat
- (f) Melihat nilai nilai positif dari sisi atau pengalaman yang lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diambil kesimpulan bahwa Penghulu Teluk Mesjid tidak memenuhi ciri ciri kepemimpinan beretika yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, hal ini ditunjukkan dengan hanya memenuhi 1 (Satu) ciri kepemimpinan beretika yaitu menemukan orang orang berintegritas dan mengembangkan kepercayaan kepadanya. Sedangkan untuk ciri kepemimpinan beretika yang lain seperti memiliki pengetahuan nilai nilai moral, mampu menjelaskan dan menjalankan nilai nilai moral dalam

kehidupannya, penghulu hanya mampu memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai moral namun tidak mampu melaksanakannya. Senantiasa fokus kepada keberhasilan organisasi di banding kepentingan individu, penghulu hanya memprioritaskan program-program namun tidak dilaksanakan sesuai prosedur. Memelihara, menyatakan dan mengembangkan nilai-nilai positif organisasi kepada masyarakat dan stakeholder, mengembangkan mekanisme berbeda pendapat dan melihat nilai-nilai positif tidak terdapat pada ciri kepemimpinan Penghulu Kampung Teluk Mesjid.

b. Standar Etika Kepemimpinan Penghulu Kampung Teluk Mesjid

- (a) Tidak membuat kebijakan atau membuat keputusan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan atau melanggar aturan, dan tidak melibatkan orang-orang lain untuk kepentingan ini.
- (b) Selalu bertindak cermat, menghindari sekecil mungkin berbuat kesalahan.
- (c) Berusaha bekerja baik dan membimbing orang lain

Membela orang-orang yang bekerja baik dan benar dan melindungi mereka yang memberikan informasi yang penting atau laporan yang penting dan berguna berkenaan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diambil kesimpulan bahwa Penghulu Kampung Teluk Mesjid FS tidak memenuhi standar etika kepemimpinan yakni tidak membuat suatu kebijakan yang bertentangan dengan peraturan dengan peraturan perundangan, selalu bertindak cermat, berusaha bekerja dengan baik dan membela orang-orang yang bekerja dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Penghulu Kampung Teluk Mesjid FS belum memenuhi standar etika kepemimpinan yang ada.

c. Indikator Etika Kepemimpinan Pemerintahan

(a) Akomodatif, Seorang penghulu kampung harus dapat menerima kritik atau usulan dari berbagai pihak, hal ini harus dilakukan karena kebenaran itu tidak hanya datang dari satu pihak, tetapi dari semua orang.

(b) Sensitive, seorang penghulu kampung juga harus sensitif, karakter kepemimpinan ini ditandai dengan kemampuan untuk secara dini memahami dinamika perkembangan masyarakat, mengerti apa yang mereka butuhkan, dan mengusahakan agar menjadi pihak pertama yang member perhatian terhadap kebutuhan itu.

(c) Responsif, karakter ini ditandai aktifnya pemimpin jika berhadapan dengan rakyat, pemimpin dalam hal ini lebih banyak berperan menjawab aspirasi atau tuntutan masyarakat yang disalurkan melalui media massa. Setiap usulan rakyat tidak hanya didengar saja, tetapi ditindak lanjuti dengan aksi.

(d) Proaktif, Karakter ini ditandai sikap antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang akan timbul yang akan merugikan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diambil kesimpulan bahwa Penghulu Kampung Teluk Mesjid tidak memenuhi indikator pemimpin yang beretika dalam pemerintahan. Hal ini terlihat dari Penghulu Kampung Teluk Mesjid tidak memiliki sifat akomodatif, proaktif dan responsive. Ketiga indikator ini merupakan karakter yang menentukan etika seorang pemimpin dalam pemerintahan. Dari keseluruhan indikator Penghulu Kampung Teluk Mesjid hanya memenuhi satu kriteria yakni sensitive.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan informan dapat dirangkum bahwa etika kepemimpinan yang dilakukan oleh Penghulu Kampung Teluk Mesjid Bapak FS selama kepemimpinannya tahun 2020-2022 terbilang kurang baik, ini ditunjukkan dari berbagai permasalahan yang terjadi selama

penyelenggaraan pemerintahan kampung dimasa kepemimpinannya. Penghulu Kampung Teluk Mesjid tidak memenuhi ciri ciri kepemimpinan beretika dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung hal ini ditunjukkan dengan hanya memenuhi 1 (Satu) ciri kepemimpinan beretika yaitu menemukan orang orang berintegritas dan mengembangkan kepercayaan kepadanya.

sedangkan untuk ciri kepemimpinan beretika yang lain seperti memiliki pengetahuan nilai nilai moral, mampu menjelaskan dan menjalankan nilai nilai moral dalam kehidupannya, penghulu hanya mampu memiliki pengetahuan tentang nilai nilai moral namun tidak mampu melaksanakan dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Senantiasa fokus kepada keberhasilan organisasi di banding kepentingan individu, penghulu hanya memprioritaskan program program namun tidak dilaksanakan sesuai prosedur. Memelihara, menyatakan dan mengembangkan nilai nilai positif organisasi kepada masyarakat dan stakeholder, mengembangkan mekanisme berbeda pendapat dan melihat nilai nilai positif tidak terdapat pada ciri kepemimpinan Penghulu.

Kampung Teluk Mesjid. Penghulu Kampung Teluk Mesjid FS tidak memenuhi standar etika kepemimpinan yakni tidak membuat suatu kebijakan yang bertentangan dengan peraturan dengan peraturan perundangan, selalu bertindak cermat dan membela orang-orang yang bekerja baik dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa Penghulu Kampung Teluk Mesjid belum memenuhi standar etika kepemimpinan yang ada. Penghulu Kampung Teluk Mesjid tidak memenuhi indikator pemimpin yang beretika dalam pemerintahan. Hal ini terlihat dari Penghulu Kampung Teluk Mesjid tidak memiliki sifat akomodatif, proaktif

dan responsive. Ketiga indikator ini merupakan karakter yang menentukan etika seorang pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan.

H. SARAN

- (a) Pemerintah daerah bersama lembaga swadaya masyarakat bersama sama dengan masyarakat setempat perlu mengawasi dan memperhatikan etika perilaku kepemimpinan yang dilakukan penghulu kampung agar tidak terjadinya salah guna wewenang oleh penghulu kampung dalam menyelenggarakan pemerintahan di kampung guna mendukung memajukan kampung tersebut baik dalam infrastruktur maupun perekonomian kampung.
- (b) Masyarakat harus memperhatikan ciri-ciri kepemimpinan beretika yang ada pada seorang pemimpin. Hal ini berguna untuk menentukan pemimpin yang berkualitas sehingga dapat memajukan daerah yang dipimpinnya.
- (c) Perlunya penerapan standar etika kepemimpinan yang baik khususnya pada pemerintahan kampung. Hal ini agar penghulu memiliki acuan dalam melakukan pekerjaannya dan juga mencegah terjadinya permasalahan dan penyimpangan dalam kepemimpinan.

I. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adha, B. (2022). *Kejari Siak tahan Penghulu Kampung Teluk Mesjid terkait penyelewengan anggaran Rp231 juta*. Antara News. <https://riau.antaranews.com/berita/278369/kejari-siak-tahan-penghulu-kampung-teluk-mesjid-terkait-penyelewengan-anggaran-rp231-juta>
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Setia Bandung.
- Arista Putri, I., Sujono, A., Elsa Nova, S., Studi Ilmu Pemerintahan, P., & Raja Haji Tanjungpinang, S. (2020).

- Hubungan Antara Sikap Kepemimpinan Dengan Etika Organisasi: Suatu Tinjauan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 330–344.
- Badu, S. Q., & Djafri, N. (2017). *Kepemimpinan & Perilaku Organisasi*. Ideas Publishing.
- Efendi, Mu. R., Idris, A., & Dama, M. (2018). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 1259–1270.
- Erlangga, H. (2018). *Kepemimpinan*. FISIP UNPAS Press.
- Fathoni, M., Suryadi, & Rengu, S. P. (2018). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(1), 139–146.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Ismail. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books Krapyak.
- Kuengo, S., Posumah, J. H., & Dengo, S. (2017). Kompetensi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tounalet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(046).
- Kusriyah, S. (2019). *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. UNISSULA PRESS.
- Labolo, M. (2016). *Modul Etika Pemerintahan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Lahada, G. (2018). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kemasyarakatan di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 11(1), 1–10.
- Lamangida, T., Akbar, M. F., & Hasan, H. (2017). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(1), 68.
- Lina, M. (2022). Etika Kerja Aparatur Pemerintah Desa Lantapan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. *MINISTAL: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(1), 59–70.
- Mahkamah Agung RI. (2022). *Putusan (Patent No. 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN/PBR)*.
- Nugroho, I. (2013). Mengembangkan etika kepemimpinan: Fenomena pada jabatan publik. *Diskusi Bulanan Malang Corruption Watch (MCW)*. Universitas Widyagama Malang, 20, 1–6.
- Nugroho, I. (2018). Mengembangkan Etika Kepemimpinan Pada Jabatan Publik. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 4, 57–67.
- Rati, E. A., Chotimah, U., & Alfiandra, A. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sako Makmur Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian ...*, 71–80.
- Sahril. (2021). *Sering Dimaki Kades, Aparatur Desa Teluk Mesjid Mogok Kerja*. <https://www.gatra.com/news-507216-hukum-sering-dimaki-kades-aparatur-desa-teluk-mesjid-mogok-kerja.html>
- Setianto. (2022). *Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Rp231 Juta, Kepala Desa Teluk Masjid Siak Jadi Tersangka*. Era.Id. <https://era.id/daerah/92992/kasus-dugaan-korupsi-dana-desa-rp231-juta-kepala-desa-teluk-masjid-siak-jadi-tersangka>
- Shinta, A., Widiatoro, W., & Yosef, L. G. (2015). Belajar Menjadi Pemimpin Baik dalam Organisasi dengan Kepemimpinan Buruk. *Seminar Psikologi Dan Kemanusiaan*, 978–979.
- Sineke, A., Gosal, R., & Lopian, M.

- (2017). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Siswanti, Y. (2015). *Kepemimpinan Manajerial*. Edumedia.
- Subagyo, A. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Bandung Dan Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 2(1), 65–77.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.)). Penerbit Alfabeta.
- Sutono. (2022). *Penghulu Teluk Mesjid Terkesan Arogan, LCKI Siak Minta Penegak Hukum Turun Lapangan Cek Proyek Fisik Jalan*. Lineperistiwa.Com.
<https://lineperistiwa.com/news/detail/1596/penghulu-teluk-mesjid-terkesan-arogan-lcki-siak-minta-penegak-hukum-turun-lapangan-cek-proyek-fisik-jalan>
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44–54.
- Wijaya, D. K., & Choiriyah, I. U. (2022). Leadership Style of Village Heads in Village Infrastructure Development : Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 19(7), 1–5.